

PENGARUH PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DAN STANDAR AKUTANSI
PEMERINTAHAN (SAP) TERHADAP AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH (LKPD)
(STUDI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI JAWA TIMUR)
SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana EKONOMI DAN BISNIS
Progdi Akuntansi



Diajukan Oleh :
Arief Rachman
1013010051/FEB/EA

Kepada

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
JAWA TIMUR
2014

PENGARUH PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DAN STANDAR AKUTANSI
PEMERINTAHAN (SAP) TERHADAP AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH (LKPD)

SKRIPSI



Diajukan Oleh :
Arief Rachman
1013010051/FEB/EA

Kepada

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
JAWA TIMUR
2014

SKRIPSI
PENGARUH PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DAN STANDAR AKUTANSI
PEMERINTAHAN (SAP) TERHADAP AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH (LKPD)
(Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur)

Disusun oleh :

Arief Rachman
1013010051/FEB/EA

Telah dipertahankan Dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Progdi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Pada tanggal 28 Februari 2014

Pembimbing :
Pembimbing Utama

Dr. Gideon setyo B, Msi

Tim Penguji :
Ketua

Dr. Gideon setyo B, Msi

Sekretaris

Dra. Ec. Sri Hastutik, Msi

Anggota

Dra. Ec. Tituk DW, MAks

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa timur

Dr. H . Dhani Ichsanuddin Nur, MM
NIP. 19630924 198903 1001

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, kenikmatan dan anugrahnya yang tak terhingga sehingga saya berkesempatan menimba ilmu hingga jenjang perguruan tinggi. Berkat rahmatnya pula,memungkinkan saya untuk menyelesaikan skripsi dengan judul “Penerapan Good Governance Dan Standar Akutansi Pemerintahan (SAP) Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”

Sebagaimana diketahui bahwa penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE). Walaupun dalam penulisan skripsi ini penulis telah mencurahkan segenap kemampuan yang dimiliki,tetapi penulis yakin tanpa adanya saran dan bantuan maupun dorongan dari beberapa pihak maka skirpsi ini tidak akan mungkin tersusun sebagaimana mestinya.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Teguh Soedarto, MP, selaku rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Dr. H. Dhani ichsanudin N., MM, Selaku Dekan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Bapak Dr. Hero Priono,M.Si, AK, Selaku Progdil Akutansi Dekan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

4. Bapak Dr. Gideon Setyo B., M.Si., Selaku Dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dengan sabar memberi pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Para dosen yang telah memberikan banyak bekal ilmu pengetahuan dan suri tauladan kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
6. Orang tua, dan kakak yang telah memberikan semangat dan doa pada saat pembuatan skripsi.
7. Teman-teman saya Putu, helmi, jamal, agung, acil, rizky, budiman, yogi, dimas nova, firda, epol luluk, apri, ega, cadra, huda, mayang, yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi sehingga proses pengerjaan lebih mudah.
8. Seluruh Kawan-kawan Himpanan Mahasiswa akutansi “HMAK” yang telah memberi pelajaran organisasi yang tak ternilai harganya.
9. Seluruh pegawai Dinas Pekerjaan Umum Ciptakarya yang telah membantu memperoleh informasi dalam penyusunan skripsi ini
10. Ibu Alimun dan irfan purnomo yang telah memberikan link ke dinas dan memudahkan saya untuk menyelesaikan skripsi
11. Virda amalia yang memberi saran-saran dalam proses pengerjaan skripsi
12. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam proses pengerjaan skripsi ini sampai selesai

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua kebaikan dan selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, walaupun demikian saran dan petunjuk yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaannya. Penulis mengharapkan Penelitian ini dapat menambah pengetahuan kita serta bermanfaat bagi semua pihak

Surabaya, Februari 2014

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
ABASTRAKSI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Penelitian Terdahulu	7
2.2 Landasan Teori	11
2.2.1 Good governance	11
2.2.1.1 Tiga pilar element good governance.....	12
2.2.1.2 Ciri-ciri good governance.....	13

2.2.1.3 Tiga domain good governance.....	13
2.2.2 Standar akuntansi pemerintahan.....	14
2.2.2.1 Lingkungan Akuntansi Pemerintah Berdasarkan PP No 71 thn 2010.....	15
2.2.2.2 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Menurut PP No. 71 Tahun 2010	16
2.2.3. Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	19
2.2.3 Pengaruh Penerapan Good Governance Dan SAP Terhadap Akuntabilitas LKPD.....	20
2.4 Kerangka pemikiran.....	21
2.5 Hipotesis	22
 BAB III METODE PENELITIAN.....	 24
3.1 Objek Penelitian	24
3.2 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel.....	24
3.2.1 Definisi Operasional Variabel.....	24
3.3.2 Pengukuran Variabel.....	26
3.3 Populasi dan sampel.....	31
3.3.1 Populasi.....	31
3.3.2 Sampel.....	32
3.4 Teknik Pengumpulan Data	33
3.4.1.Sumber data.....	33

3.4.2 Jenis data.....	33
3.4.3. Metode pengumpulan data.....	33
3.5 Teknik Analisis dan Uji Hipotesis.....	34
3.5.1 Uji instrument.....	34
3.5.2 Uji regresi berganda.....	37
3.5.3. Uji hipotesis.....	39
 BAB IV Hasil penelitian dan pembahasan	42
4.1 Deskripsi Data Penelitian.....	42
4.1.1 Data Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Pemprov Jatim Berdasarkan Gender.....	42
4.1.2 Data Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Pemprov Jatim Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan.....	43
4.1.3 Data Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Pemprov Jatim Berdasarkan Usia.....	44
4.1.4 Rekapitulasi Jawaban Penerapan Good Governance (X1).....	45
4.1.5 Rekapitulasi Jawaban Penerapan SAP (X2).....	46
4.1.6 Rekapitulasi Jawaban Akuntabilitas LKPD (Y).....	48
4.2 Hasil penelitian.....	49
4.2.1 Uji validitas.....	49

4.2.1.1 Uji Validitas Penerapan Good Governance.....	49
4.2.1.2 Uji Validitas Penerapan Standar Akutansi Pemerintahan (SAP).....	51
4.2.1.3 Uji Validitas Akuntabilitas LKPD.....	52
4.2.2 Uji reabilitas	53
4.2.3 Uji normalitas.....	54
4.3 Uji Asumsi klasik.....	56
4.3.1 Uji Multikolinieritas.....	56
4.3.2 Uji hetroskedaastisitas.....	58
4.4 Uji regresi linear.....	59
4.4.1 Persamaan regresi.....	59
4.4.2 Koefisien detrminasi.....	61
4.5 Uji Hipotesis.....	62
4.5.1 Uji F.....	62
4.5.2 Uji t.....	63
4.6 Pembahasan.....	64
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	68
5.1 Kesimpulan.....	68
5.2 Saran.....	68
5.3 Keterbatasan dan Implikasi.....	69
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

Penerapan Good governance dan Standar Akutansi Pemerintahan (SAP) Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Arief Rachman

Abstrak

Good governance atau tata kelolah pemerintahan yang baik dan Standar akutansi pemerintahan (SAP) adalah salah satu faktor penentu akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Oleh karena itu Penerapan Good governance dan SAP sangat diperlukan untuk memperoleh akuntabilitas LKPD yang baik. Atas dasar pemikiran tersebut penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang pengaruh penerapan Good governance terhadap akuntabilitas LKPD dan pengaruh penerapan SAP terhadap akuntabilitas LKPD.

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil kuisisioner di Dinas Pendapatan Umum Cipta karya. Untuk memenuhi tujuan penelitian, hipotesis diuji dengan uji t untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara Good governance dan SAP terhadap akuntabilitas LKPD baik secara parsial maupun simultan.

Kata kunci: Good governance, Standart akutansi pemerintahan, Akuntabilitas, Laporan keuangan pemerintah daerah, Dinas P.U Cipta karya

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntabilitas merupakan salah satu unsur pokok perwujudan good governance yang saat ini sedang diupayakan di Indonesia. Pemerintah diminta untuk melaporkan hasil dari program yang telah dilaksanakan sehingga masyarakat dapat menilai apakah pemerintah telah bekerja dengan ekonomis, efisien dan efektif. Akuntabilitas dapat dilihat dari perspektif akuntansi, perspektif fungsional dan perspektif sistem akuntabilitas, Sadjiarto (2000).

Bersatu bertekad untuk mewujudkan akuntabilitas yang baik dan untuk untuk memenuhi aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara diperlukan juga faktor-faktor penunjang seperti penerapan good governance dan penerapan standart akuntansi pemerintahan (SAP) yang baik.

Good governance dapat diartikan sebagai pelayanan publik yang efisien, sistem pengadilan yang dapat diandalkan, pemerintahan yang bertanggung jawab (accountable) pada publiknya. Good governance adalah, penyelenggaraan pemerintahan kesinergiaan interaksi yang konstruktif diantara domain- domain (state, private sector and society). Tiga pilar elemen dasar yang solid dan bertanggungjawab serta efisien dan efektif dengan menjaga Tiga pilar elemen dasar yang saling berkaitan satu dengan lainnya dalam mewujudkan good governace (Osborne and Geabler, 1992, OECD and World Bank, 2000, LAN dan BPKP, 2000; 6) adalah sebagai berikut:

- 1) Transparansi, yaitu keterbukaan dalam manajemen pemerintah, lingkungan, ekonomi dan sosial.
- 2) Partisipasi, yaitu penerapan pengambilan keputusan yang demokratis serta pengakuan atas HAM, kebebasan pers dan kebebasan mengemukakan pendapat/ aspirasi masyarakat.
- 3) Akuntabilitas, yaitu kewajiban melaporkan dan menjawab dari yang dititipi amanah untuk mempertanggungjawabkan kesuksesan maupun kegagalan kepada penitip amanah sampai yang memberi amanah puas dan bila belum ada atau tidak puas dapat kena sanksi.

Standar Akuntansi Pemerintahan mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Untuk mencapai tujuan tersebut, standar ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan.

Pada PP no 71 tahun 2010 menyatakan bahwa, SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. SAP Berbasis Kas Menuju Akrual adalah

SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual. Laporan keuangan pokok terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Arus Kas; (d) Catatan atas Laporan Keuangan. Selain laporan keuangan pokok tersebut, entitas pelaporan diperkenankan menyajikan Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas (PSAP, KK; 2010)

Terjadinya krisis ekonomi di Indonesia disebabkan oleh tata kelola yang buruk (*bad governance*) pada sebagian besar pelaku ekonomi (publik dan swasta) hal ini seperti dikuatkan oleh pendapat Sunarsip (2001). Salah satu usaha memulihkan kondisi ekonomi, sosial dan politik adalah dengan mengembalikan kepercayaan rakyat kepada pemerintah dengan mencoba mewujudkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa atau yang dikenal dengan istilah *good governance*. Oleh karena itu tuntutan terhadap terwujudnya *good governance* (tata kelola yang baik) sangat diperlukan terutama di instansi pemerintah. Upaya ini juga didukung oleh banyak pihak baik pemerintah sendiri sebagai lembaga eksekutif, DPR sebagai lembaga legislatif, pers dan juga oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat.

Penetapan UU No. 22 tahun 1999 dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 oleh pemerintah, mengenai Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, berimplikasi pada tuntutan otonomi yang lebih luas dan akuntabilitas publik yang nyata yang harus diberikan kepada pemerintah daerah (Halim, 2001). Selanjutnya, Undang-Undang ini diganti dan disempurnakan dengan Undang-Undang No. 32 tahun

2004 dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004. Kedua undang-undang tersebut telah merubah akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemerintah daerah dari pertanggungjawaban vertikal (kepada pemerintah pusat) ke pertanggungjawaban horisontal (kepada masyarakat melalui DPRD). Pada intinya semua peraturan tersebut menginginkan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun, setelah sembilan tahun berlakunya paket undang-undang tersebut, hampir belum ada kemajuan signifikan dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan Negara/Daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1

Opini Bpk Tentang LKPD Di Indonesia Tahun 2012

NO	Opini	Jumlah Entitas
1	WTP (Wajar tanpa pengecualian)	113
2	WDP (Wajar dengan pengecualian)	267
3	TMP (Tidak menyatakan pendapat)	31
4	TW (Tidak wajar)	4

Sumber: Siaran pers BPK RI (1 oktober 2013)

Dari siaran pers tersebut dapat dikemukakan bahwa masih terdapat beberapa LKPD yang menerima opini TW sedangkan yang memperoleh opini WDP jauh lebih besar dibandingkan dengan WTP, juga masih ada yang mendapatkan opini TMP. Dengan demikian dapat dikatakan pengelolaan keuangan pemerintahan belum dilakukan dengan baik. Unit analisis dalam

penelitian ini adalah dinas pekerjaan umum cipta karya dan tata ruang provinsi jawa timur dikarenakan penelitian ini dilakukan pada akhir tahun dimana dinas-dinas pemerintahan sedang melakukan tutup buku sehingga penelitian ini terbatas dan terfokus pada 1 dinas pemerintahan. Dinas PU cipta karya dan tata ruang bergerak di bidang tata ruang seperti pengembangan perumahan di perkotaan dan di pedesaan serta melaksanakan pembinaan teknis, pembangunan, pengelolaan bangunan gedung serta pembinaan jasa

Berdasarkan uraian sebelumnya maka penelitian ini mengambil judul “**PENGARUH PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DAN STANDART AKUNTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI JAWA TIMUR)**”

1.2 Rumusan Masalah

- a. Apakah penerapan Good Governance (X_1) berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD)?
- b. Apakah penerapan standart akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD)?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis penerapan Good Governance
- b. Untuk menganalisis apakah dalam pembuatan laporan keuangan sudah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Operasional (Praktis)

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi bagi instansi atau lembaga dalam upaya mewujudkan penerapan Good Governance serta SAP dalam membuat, memberikan dan mencapai akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang baik atas penggunaan dana publik yang dipercayakan masyarakat.

2. Manfaat Akademis

Diharapkan hasil penelitian dapat menjadi sumber referensi bagi para mahasiswa/i dalam pengembangan teori Akuntansi Pemerintahan lebih khusus Good Governance dan penerapan SAP dalam pencapaian akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD).